

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hasil Analisis terhadap Penyebab faksionalisasi PPP, PAN dan PKS, keterlibatan aktor politik, dan dampak yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan partai dan Ummat Islam di Maluku Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faksionalisme dilatarbelakangi oleh dua faktor pendorong eksternal-internal dan penyebab utama. Penyebab eksternal yaitu intervensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terhadap struktur PPP, PAN dan PKS terhadap masalah-internal di struktur wilayah Maluku Utara, dan faktor internal yaitu semakin menguatnya identitas politik heterogenitas etnis atau suku di internal partai. Kedua faktor Eksternal dan internal ini turut mendorong timbulnya faksionalisme yang ditandai oleh dominasi Patronase Keluarga, Dinastik dan Pemodal dalam mengejar Kesejahteraan, memperebutkan Kursi Ketua Partai dan posisi kunci lainnya, dan terutama persaingan internal aktor partai pada setiap Pemilu dan Pilgub.
2. Keterlibatan aktor partai politik dengan berbagai latar belakang identitas kultural yang heterogen (Etnis dominan yaitu Etnis Makian, Tobelo-Galela, Ternate, Tidore, dan Sula), identitas ideologi partai (PPP Islam Tradisional, PAN Islam Modernis, PKS Islam Progresif) dan tipologi aktor yang dominan yaitu keluarga, dinastik dan Pemodal. Keterlibatan aktor politik ditandai dengan praktek dari faksi klientelisme lemah sampai pada faksi klientelisme kuat di internal PPP. Pada internal PAN terdapat dinamika pengorganisasian dan motivasi model faksi kepentingan

seperti dominasi aktor tipe keluarga, pemodal dan pertentangan ideologi faksi yang kompetitif. Latar belakang organisasi aktor yaitu Muhammadiyah, HMI, Pengusaha, Akademisi dan Birokrat. Demikian pula dominasi di internal PKS lebih didominasi etnis Tobelo Keluarga kasuba sebagai klientelistik kuat, dan etnis Makian lainnya yang mendominasi kelompok kaum Muda.

3. Faksionalisme internal partai telah berdampak terhadap kegagalan partai dalam Pemilu, telah terjadi perpecahan Struktur Partai, Dualisme Kepemimpinan, berdampak juga terhadap diskonektivitas partai dengan Ummat Islam. Faksi yang bertikai di PPP berdampak buruk terhadap gagalnya partai dalam pemilu 2014 dan 2019 yaitu hilangnya kursi perwakilan di beberapa DPRD Kabupaten dan Provinsi Maluku Utara. PAN masih beruntung mendongkrak kursi di DPRD Provinsi Maluku Utara, tetapi selalu mengalami perpecahan internal, perebutan posisi kunci partai dan berdampak luas terhadap diskonektivitas partai dengan jejaring sosial seperti Muhammadiyah. Melemahnya konektivitas ini disebabkan oleh posisi tokoh politik Muhammadiyah tidak berada dalam lingkaran penentu kebijakan partai. Demikian pula dampak faksionalisme terhadap PKS memperburuk hubungan internal keluarga Kasuba yang mendominasi PKS sejak dibentuk tahun 1998 (Partai Keadilan-PK), dan tahun 2003. Konflik keluarga juga disimbolkan sebagai konflik politik internal Etnis Muslim Tobelo dan Galela yang masih serumpun. Diskonektivitas antara partai Islam dengan Ummat Islam telah melahirkan fenomena lemahnya respon partai atas berbagai masalah yang menimpa Ummat Islam seperti kemiskinan di

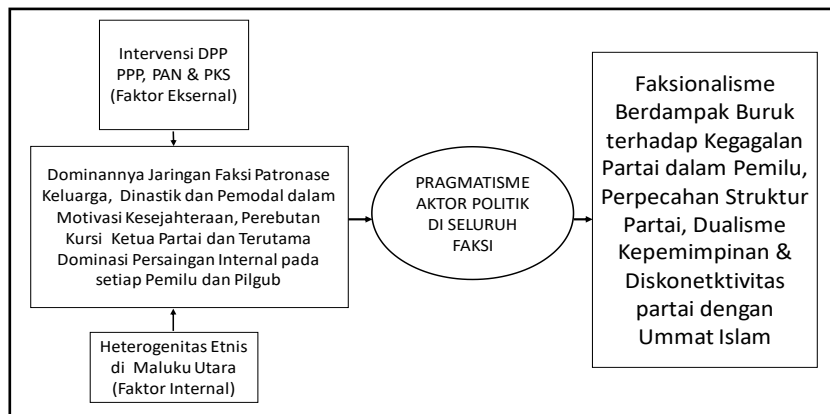
berbagai daerah, dugaan pemurtadan di Pulau Morotai, dan prostitusi online. Menurunnya keberpihakan partai Islam terhadap masalah sosial disebabkan oleh bergesernya orientasi aktor partai dari politik Islam ideologis berubah menjadi Politik Islam yang lebih pragmatis. Pragmatisme PKS yang mencalonkan Calon Bupati Sula Hendrata Tess, Pengusaha China Non-Muslim di daerah berlatarbelakang 90 persen Muslim.

Dalam mengembangkan teori dari hasil penelitian ini adalah memanfaatkan temuan tentang Faktor pendorong Eksternal dan Internal, Keterlibatan aktor politik yang pragmatis bersumber dari patronase keluarga, Dinastik dan Pemodal dari berbagai etnis dominan untuk menganalisis sebab terjadinya faksionalisasi partai politik pada PPP, PAN dan PKS dan Dampak yang ditimbulkannya.

Pernyataan teoritik yang tepat diformulasikan dalam disertasi ini adalah bahwa jaringan faksi keluarga, dinastik dan pemodal dari etnis dominan yang terlibat konflik heterogenitas etnis dan ideologi yang tajam, motivasi kesejahteraan, perebutan posisi kunci partai dan persaingan internal akan berdampak buruk terhadap Partai Politik Islam dan ummat Islam di Maluku Utara, jika masih dominannya praktek patronase dan pragmatisme politik.

Secara skematik pengembangan teoritik ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.1. Skema Tentang Pengembangan Teoritik Penelitian



Pada Gambar 6.1 : Skema Pengembangan Teoritik Penelitian Kebaruan penelitian (Novelty) dalam penelitian ini yaitu tergambarannya pola pragmatisme seluruh aktor faksi partai politik Islam di Maluku Utara. Pola pragmatisme dipengaruhi oleh faktor pendorong eksternal (Intervensi Pimpinan Pusat partai) dan faktor internal (menguatnya praktek politik identitas Etnis yang heterogen), dan dominasi aktor politik dalam faksi keluarga, dinastik dan pemodal di Maluku Utara sejak tahun 2014-2019. Kebaruan ini berbeda dengan keumuman teori Boucek tentang faktor penyebab faksionalisme partai. Perbedaan itu dapat dilihat pada urutan penyebab dan dinamika penyebab. Secara teoritis, keumuman penyebab faksionalisme secara berurutan yaitu (1) kesuksesan partai mendorong timbulnya persaingan internal; (2) Heterogenitas, konflik ideologi dan resiko Perpecahan; (3) Perebutan posisi kunci yang terbatas untuk menunjang karir politik; (4) Motivasi kesejahteraan dalam dilemma kolektivitas partai vs individu (Boucek, 2012).

Namun kebaruan dari hasil kajian ini menemukan pergeseran urutan penyebab faksionalisme Boucek di Maluku

Utara yang dipengaruhi oleh faktor dinamika politik identitas etnis yang lebih bersifat lokal. Di tengah dominannya konflik internal dalam faksi keluarga, dinastik dan pemodal, kelompok kepentingan ini memiliki basis sosial yang jelas berdasarkan pengelompokan dalam 4 etnis dominan yaitu Tobelo-Galela, Makian, Ternate, Tidore dan Sula-Buton. Selain aktif dan terlibat langsung dalam penguasaan sumberdaya ekonomi partai, perebutan kursi ketua partai dan Pilgub, keterlibatan etnis sebagai instrument politik lokal yang lebih kuat dalam pengelompokan sosial, faksi di partai.

Dengan demikian, studi penyebab faksionalisme di Maluku Utara mengalami pergeseran urutan yaitu diawali dari (1) Heterogenitas etnis mendorong perpecahan;(2) Motivasi kesejahteraan yang didominasi keluarga, dinastik dan pemodal yang pragmatis; (3) Perebutan posisi kunci partai yang destruktif demi keberlanjutan karir politik; dan (4) kesuksesan atau kegagalan faksi dan partai dalam pemilu telah mendorong semakin tingginya persaingan internal.

Perubahan urutan ini juga didorong oleh menguatnya persaingan internal sebagai puncak dan tujuan utama menguasai Lembaga politik DPRD dan kursi Gubernur di Maluku Utara. Persaingan internal lebih dominan memicu faksionalisasi internal partai dan mempengaruhi peta pengelompokan heterogenitas etnis, motivasi sumberdaya, dan perebutan posisi kunci terbatas.” Dampaknya, Pemenang dari persaingan internal lebih mudah mengontrol perbedaan ideologi dan heterogenitas etnis, lebih mudah mengendalikan sumberdaya partai dan pemerintahannya dan memiliki akses besar dalam mendapatkan partai.

Hasil penelitian ini juga telah menemukan cara baru dalam memahami pola pergeseran penyebab munculnya faksionalisme Boucek dan pola pengorganisasian dan motivasi aktor faksi

Bettcher yang didominasi oleh keluarga, dinastik dan pemodal di Maluku Utara. Meskipun kajian ini terbatas pada Partai PPP, PAN dan PKS, namun sekurang-kurangnya pembacaan ke arah penyebab faksionalisme memiliki relasi yang kuat dengan pola pengorganisasian motivasi faksi. Menguatnya model faksi klientelisme berbasis etnis dan keluarga di Maluku Utara didukung oleh dorongan kuat terhadap persaingan internal faksi melalui pemilu dan Pilgub.

6.2 Rekomendasi

Dari riset disertasi ini, peneliti merekomendasikan 7 (Tujuh) poin utama yang dapat dilakukan PPP, PAN, dan PKS di Maluku Utara agar dapat mengendalikan dampak buruk dinamika faksi aktor politik dan dampak buruk yang ditimbulkannya yakni kegagalan partai dalam pemilu, perpecahan internal dan dualisme kepemimpinan partai, dan diskonektivitas partai dengan umat Islam di Maluku Utara di masa akan datang sebagai berikut:

1. DPP PPP, DPP PAN, dan DPP PKS harus menjaga pola komunikasi yang lebih terbuka terhadap struktur partai di daerah dengan cara yang netral, obyektif, adil dan mengayomi seluruh faksi yang bertikai di tengah kompleksitas dan dinamika etnis sebagai salah satu politik identitas yang lebih dominan di Maluku Utara.
2. Partai Politik harus membangun kesadaran bersama dalam mengatasi dominannya jaringan faksi patronase Keluarga, dinastik dan Pemodal yang telah membajak dinamika demokratisasi intra- partai dengan menerapkan manajemen dan demokratisasi internal partai yang lebih terbuka dan kolektif.
3. Partai politik dapat harus memelihara kolegialitas, transparansi dan pengambilan keputusan, persaingan nilai positif dan meritokrasi untuk mengurangi dampak buruk berbagai praktek politik pragmatis partai politik yang

didominasi jejaring keluarga, dinastik dan pemodal.

4. Partai politik dapat mengurangi tingginya rivalitas dan konflik faksi dalam perebutan posisi kunci ketua partai dengan menerapkan demokratisasi intra-partai seleksi kandidat berdasarkan prinsip-prinsip yang prosedural dan berdasarkan kemampuannya, lebih terbuka (inklusif), dan konsensus berdasarkan perwakilan identitas politik berbasis etnis yang berimbang.
5. Partai politik harus mempertimbangkan hak-hak keterwakilan setiap anggota partai yang telah diberi tanggung jawab, legitimasi politik melalui Pemilu berdasar basis dukungan suara yang lebih luas.
6. Partai Politik harus mengatur pola komunikasi dan memperkuat konektivitas nilai dan jejaring dengan Ummat Islam dan berbagai kekuatan Organisasi sosial dan keagamaan dalam merespon masalah sosial keagamaan di Maluku Utara.
7. Hasil penelitian ini memerlukan riset lanjutan tentang semakin menguatnya pengaruh politik pragmatisme faksi keluarga, dinastik dan pemodal berbasis etnis dominan yang telah membajak eksistensi Partai politik sebagai Partai Ummat Islam, karena akan bermanfaat untuk memprediksi Pola Faksi Partai Politik Islam di masa akan datang agar mampu mengendalikan dan mengurangi dampak yang ditimbulkannya terhadap internal partai dan Ummat Islam di daerah.